

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian , Sutedi, 2018 , Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,
Sinar grafika , Jakarta.
- Ali ,Achmad Chomzah, 2003 , Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III –
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV –
Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah,Prestasi Pustaka , Jakarta.
- Amirudin dan Zinal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- A.P ,Parlindungan, 1994 , Pendaftaran Tanah di Indonesia , Mandar Maju ,
Bandung
- Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional ,1989 , Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah,
Tanpa Penerbit, Jakarta.
- Dr. J. Andi Hartanto, 2014 ,Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang
Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Harsono, Budi, 2008 ,Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Budi 2002 , Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional , Cetakan
Pertama , Univeritas Trisakti , Jakarta.
- Manulang, Fernando, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung.
- Marbun, SF, 2002, Hukum Administrasi Negara / Dimensi-Dimensi Pemikiran, UII
Press Yogyakarta , Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia,
Jakarta.
- Perangin , Efendi ,1989 , Hukum Agraria Di Indonesia, Rajawali , Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010 ,Pendaftaran Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana ,
Jakarta.
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Agoes S Soedomo, 2015 ,Peta Tunggal BPN Untuk Peningkatan Kualitas Sistem Pendaftaran Tanah (Permasalahan, Peluang Dan Alternatif Solusinya), *Indonesian Journal of Geospatial* Vol.4 No. 1
- Atik Winanti dan CN Saraswati , 2021, Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia, Vol.8 No. 1.
- Darwis, Anatami , 2017 , Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* ,Vol.12 No.1.
- Glen, Rio Rumpia , 2021 , Studi Kasus Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , *Lex Administratum*, Vol.9 No.7.
- Karno, Zulpian, 2016, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non- Ligitasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Study Di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol.3, No.3. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Prasetyo Aryo Dewandaru , Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni ,2020 , Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional , *Notarius* , Vol.13 No. 1.
- Pratomo Beritno ,2020, Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kota Palangkaraya , *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 5No. 1.
- Safitri Subianto ,Azis Putra Aditama, , dan Janu Fauzi Amarohman, 2020, Uji Kualitas Peta Pendaftaran Tanah Pada Sistem Geokp Di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, *Jurnal Geodesi Undip* Vol.9 No. 2.
- Syukron Salam dan Tri Andari Dahlan , 2021 , Sertifikat Ganda Dan Urgensi Pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran Tanah, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* , Vol.33.

Wahyuni, 2017, Manajemenn Pertanahann Nasional Dengann Pendekatan *Unified Modelling Language* (Uml), *Bhumi* Vol.3, No. 1.

Peraturan Peundang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, Cetakan Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035.” Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *E-Court* :Keberlanjutan Modernisasi Peradilan, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi , Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia , 2016, Laporan Tahunan MA 2015. Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia , 2017, Laporan Tahunan MA 2016. Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia , 2018, Laporan Tahunan MA 2017. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017. Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 062/G/2014/PTUN.
SMG. j.o Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
56/B/2015/PT.TUN.SBY j.o Putusan MA Nomor 507 K/TUN/2015

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043).